

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang TNI sebagai kekuatan Sosial Politik di Masa Orde Baru yaitu keterlibatan TNI dalam sosial politik erat kaitannya dengan konsep dwifungsi ABRI sebagai doktrinnya. Seperti doktrin perjuangan TNI yang dihasilkan dalam seminar TNI Tri Ubaya Cakti pada tahun 1965 yang antara lain menegaskan bahwa “sebagai Golongan Angkatan Bersenjata, merupakan suatu kekuatan sosial politik dan kekuatan militer. Konsep dwifungsi ABRI juga terkandung secara implisit pada gagasan Mayjen A.H. Nasution (Kepala Staf AD) pada tahun 1958 dengan konsep “jalan tengah”, dimana peran tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka. Inilah yang mengakibatkan pada awal Orde Baru dwifungsi dalam arti struktural terus dijalankan karena perwira-perwira ABRI memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan secara langsung. Dimana militer menjadi kunci hampir disetiap jabatan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.

2. TNI sebagai kekuatan dibidang sosial dan politik di masa orde baru.

- a. Dalam bidang sosial.

Peranan TNI dalam bidang sosial sangat penting terutama dalam menjaga stabilitas keamanan berbangsa dan bernegara dalam menjamin terlaksananya proses demokrasi. Untuk mencapai stabilitas tersebut pemerintahan Orde Baru memberikan pendekatan keamanan dengan memberikan tanggung jawab tersebut kepada ABRI.

b. Dalam bidang politik

Keterlibatan ABRI dalam sosial-politik erat kaitannya dengan konsep dwifungsi ABRI. Konsep ini juga terkandung secara implisit pada gagasan Mayjen A.H. Nasution (Kepala Staf AD) pada tahun 1958 dengan konsep “jalan tengah” dimana peran tentara tidak terbatas pada tugas profesionalisme militer belaka. Konsep jalan tengah tentara oleh Mayjen A.H. Nasution dan UUD 1945 telah memberi legitimasi yang kuat kepada golongan fungsional, termasuk tentara untuk masuk kedalam politik negara.

TNI telah menguasai berbagai aspek kehidupan dengan praktik-praktik yang tidak wajar. Mereka dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh Presiden Soeharto. Soeharto mendayagunakan peran sosial politik ABRI untuk mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi dengan menciptakan format politik Orde Baru.

Beberapa karakteristik format politik Orde Baru yang menonjol adalah sebagai berikut :

- Politik Sentralisasi di Tangan Eksekutif
- Pendekatan Keamanan
- Dominasi Militer dan Perluasan Dwifungsi ABRI
- Rendahnya Apresiasi terhadap Supremasi Hukum dan HAM
- Otoritas Birokrasi yang Berlebihan.
- Pelaksanaan sistem Komando.

3. Pengaruh TNI sebagai kekuatan Sosial Politik dalam kaitannya dengan mewujudkan stabilitas keamanan di masa orde baru adalah sebagai berikut

a. Dalam Bidang Sosial

Perluasan peran sosial politik militer telah menyempitkan ruang gerak masyarakat untuk bertindak dan menyampaikan aspirasinya, karena militer merupakan kekuatan utama eksekutif. Dalam rangka memisahkan masyarakat dari kehidupan politik, Orde Baru melakukan depolitisasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Strategi langsung diarahkan kepada masyarakat didesa, yang merupakan massa terbesar di Indonesia. Jaringan administrasi pemerintahan, militer, lembaga-lembaga di desa dalam praktiknya dikontrol oleh aparat pemerintahan dan militer. Format politik Orde Baru dengan tumpuan dwifungsi ABRI berperan negatif dalam pertumbuhan sosial masyarakat. Kemandirian politik tidak diciptakan karena adanya depolitisasi. Kebebasan juga tidak bisa diciptakan, karena Orde Baru

tidak membolehkan organisasi atau kelompok kepentingan yang ingin bebas dari negara. Akses terhadap lembaga negara juga sulit diwujudkan, karena pemerintah Orde Baru melarang partisipasi politik rakyat. Rakyat hanya dikehendaki menerima saja kebijakan pemerintah, apalagi unjuk rasa dilarang keras oleh pemerintah.

b. Dalam Bidang Politik

Orde Baru dengan dwifungsi militer yang sangat dominan telah menghalangi partisipasi rakyat, mengekang kebebasan asasi warga negara. seperti kebebasan menyatakan pendapat, menyampaikan aspirasi, kebebasan berorganisasi, berkumpul dan sebagainya. Halangan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui undang-undang dan peraturan yang diciptakan maupun dengan tindakan dilapangan berupa kebijakan-kebijakan yang membatasi. Individu, organisasi masyarakat, dan partai yang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah akan mengalami kesulitan karena kontrol pemerintah. Kombinasi persuasif, represif akan dilakukan militer untuk menundukkan tantangan. Sementara budaya politik dan sistem Orde Baru tidak mendukung terciptanya demokrasi. Akibatnya, masyarakat tidak bisa ikut menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan. Partai politik memang ada, namun hanya hiasan saja. Pemilihan umum semasa Orde Baru adalah pengukuran yang tidak sempurna mengenai kehendak politik rakyat. Pemilihan itu

mencerminkan proses elektoral yang dikontrol ketat oleh pemerintah yang kekuasaannya didukung oleh ABRI, untuk memperlihatkan keabsahannya kepada rakyat dan dunia luar.

Pemilihan umum memang dilakukan secara berkala lima tahun sekali, namun itu hanya melegitimasi penguasa. Partai terlalu dikekang, tidak ada kebebasan, calon-calon diseleksi pemerintah dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

A. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Perlu dilakukan pembatasan kewenangan seorang ABRI dalam konstitusi karena Fungsi dimana Dwifungsi ABRI yang terkait dengan keterlibatan tentara Indonesia dalam politik akibat dari kondisi yang menuntutnya, seperti kondisi darurat perang dapat mungkin terjadi lagi
- Kehendak tentara untuk ikut serta dalam pembinaan negara sementara tentara tidak mau hanya sekedar sebagai pengendali keamanan dan stabilitas negara jangan sampai disalahgunakan sebagai alat perluasan politik
- Hukum yang berlaku sekarang semestinya menjadi pelindung kehidupan berbangsa dan bernegara jangan sampai dicampuri oleh kekuasaan politik.

Sehingga Hukum tidak lebih memfasilitasi kehendak penguasa politik, dan menyebabkan penegakannya menjadi sangat lemah karena campur tangan politik yang sangat dominan. Apabila hal ini terus berlangsung maka hukum akan kembali pada masa Orde Baru yaitu tidak melindungi masyarakat, tetapi merugikan masyarakat, terbukti dari banyaknya kebijakan yang melanggar aturan.

- Hukum yang dibuat untuk menjamin pelaksanaan dan hak-hak dasar warga negara serta kewajibannya termasuk tentara (ABRI) jangan sampai disalahgunakan dalam kewajiban belanegara sehingga apabila disalahgunakan maka dalam pelaksanaannya hukum dibuat untuk melayani dan melegitimasi kekuasaan semata-mata. seperti pada masa Orde Baru.